KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Ketahuan BPK Ada Proyek Mubazir, PLN Janji Investigasi Semua Gardu Induk di Daerah
Tanggal : Rabu, 07 Oktober 2015
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 15

Ketahuan BPK Ada Proyek Mubazir

PLN Janji Investigasi Semua Gardu Induk Di Daerah

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero berjanji melakukan investigasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pemeriksaan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk PLN. Dalam temuan BPK disebutkan, gardu induk dan gas insulated substation yang dibangun PLN belum dimanfaatkan, atau masuk kategori mubazir.

Corporate Secretary PLN Adi Supriono mengaku, saat ini pihaknya belum menerima hasil temuan BPK terkait pengelolaan aset yang dinilai tidak efektif dan masuk kategori mubazir. Meski begitu, PLN akan melakukan investigasi hasil temuan tersebut untuk dilanjutkan ke tahap evaluasi.

"Kami belum dapat laporannya. Kami akan cek dulu, gardu induk mana yang dimaksud BPK, setelah kami investigasi kan baru ketahuan, apa proyek tersebut benar-benar mubazir atau memang belum dioperasikan," kata Adi kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Menurut Adi, saat ini perseroan masih melakukan inventarisasi aset-aset yang dimiliki, termasuk melakukan pengawasan pada pembangunan gardu induk di daerah. Dengan langkah tersebut, akan terlihat proyek-proyek mana saja yang berjalan sesuai target atau yang kinerjanya dibawah target.

"Kita lakukan pemeriksan dulu lah, baru bisa komentar. Nanti kalau ada perkembangan, akan kita infokan," lanjut Adi.

Sebelumnya, Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, dari hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada Jaringan Transmisi dan Gardu Induk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, BPK menemukan adanya gardu induk dan gas insulated substation yang dibangun belum dimanfaatkan, atau masuk kategori mubazir.

Padahal proyek tersebut menyedot investasi yang cukup besar, senilai Rp 192,15 miliar yang dananya diambil dari kas perusahaan. Dari hasil pemeriksaan BPK, proyek gardu induk dan *gas insulated substation* ini belum bisa beroperasi karena masih terkendala pembebasan lahan.

"Beberapa material pendukung juga belum terpasang dan transmisi yang belum selesai. Selain itu pelaksanaan 15 pekerjaan jasa borongan Unit Induk Proyek Jaringan PLN mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda senilai Rp 253,32 miliar," kata Harry di Gedung DPR Senin (5/10).

Dilanjutkan Harry, pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK terhadap PLN, untuk menemukan sejumlah proyek macet. Belum dimanfaatkannya dua aset PLN tersebut, lanjutnya, menjadikan proyek itu belum terlihat efektifitasnya.

Selain mengaudit PLN, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pengelolaan aset BUMN lainnya seperti PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I serta pengoperasian rig dan kapal pada PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

Harry mengatakan, dalam pengelolaan asetnya, PT Pelindo I cukup efektif meskipun belum memenuhi kategori penilaian tertinggi efektivitas karena masih ada kelemahan dalam penggunaan dan pendayagunaan aset.

Semua pemeriksaan tersebut dimasukan ke dalam hasil pemeriksaan BPK terhadap 11 BUMN dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) yang dibacakan di hadapan sidang paripurna DPR pada Senin tanggal 5 Oktober 2015. ■ NOV

ndok Pesantren
mbilan Ring

hitam pahit itu karena sering